

## POLA KOMUNIKASI ADHOKRASI PADA TIM PELAKSANA PROGRAM CIREBON SMART CITY

Nurul Hidayah<sup>1\*</sup>, Maman Abdurahman<sup>2</sup>, Panji Prayitno<sup>3</sup>  
Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon<sup>123</sup>  
[mamanabdurahman@bungabangsacirebon.ac.id](mailto:mamanabdurahman@bungabangsacirebon.ac.id)

Received: 2021-11-25; Accepted: 2021-12-29; Published: 2021-12-31

**Abstract :** *Adhocracy is the antithesis of all bureaucratic characteristics. If the bureaucracy is seen as too rigid about the acceleration of social and technological change, it is immediately necessary to have an adhocracy as a normative administrative. The Cirebon Smart City Program Implementation Team applied an adhocratic pattern in the organizational communication process, thus leading the author to conduct this research. This research method uses qualitative methods with observation and interview data collection. Appointed as one of the cities to implement Smart City, Cirebon City is making every effort to get around various obstacles. Especially structural constraints. The structure is made as dynamic as possible by combining a combination of structural officials and implementing elements who have excellent enthusiasm and competence. Not only that, the city of Cirebon also embraces all existing elements to make the implementation of the Smart City a success. Starting from academia, business, government, media and others. This is because the Smart City program is actually a joint and ongoing program. In addition, Smart City also wants to create a safe, comfortable, prosperous and happy society in a sustainable manner, whether it uses information technology or not.*

**Keywords:** *Adhocracy, Smart City.*

---

Copyright © 2021, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



DOI: <https://doi.org/10.47453/>

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan birokrasi Indonesia dikenal dengan sesuatu yang bersifat lamban, berbelit-belit, tidak kreatif, struktur yang gemuk dan berbagai hal negatif lainnya. Sebenarnya kehadiran birokrasi tidaklah bisa terelakkan karena merupakan konsekuensi logis dari diterimanya hipotesa bahwa negara memiliki misi suci yaitu untuk menyejahterakan rakyatnya (Ahmad, 2008). Untuk itu, suatu sistem administrasi yang baik dengan tujuan mulia yaitu memberikan pelayanan kepada rakyatnya perlu untuk dibangun. Sistem ini yang kemudian disebut dengan nama birokrasi.

Dengan sistem administrasi yang baik diharapkan menciptakan birokrasi yang baik. Birokrasi yang baik sebenarnya justru bisa memberikan pelayanan yang baik pula kepada masyarakat. Terlaksananya pelayanan yang baik kepada masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan hak dan kewajiban mereka.

Untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat, pada 2017, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan mencanangkan gerakan menuju 100 *Smart City* di Indonesia. Gerakan tersebut bertujuan untuk membimbing kabupaten dan kota yang ada di Indonesia dalam menyusun masterplan *Smart City*. Sehingga pemanfaatan teknologi komunikasi yang sudah semakin akrab digunakan bisa meningkatkan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, *Smart City* memiliki tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menyatukan teknologi dalam tata kelola dan pelayanan oleh pemerintah di daerah sangat dimungkinkan karena adanya *internet of things*, yaitu jaringan perangkat elektronik yang saling terhubung dan mampu mengirimkan data atau melakukan tindak lanjut dengan meminimalkan campur tangan manusia.

Lebih lanjut Apri Junaidi (2015: 62) menjelaskan bahwa IOT (*Internet Of Things*) memungkinkan pengguna untuk mengelola dan mengoptimalkan elektronik dan peralatan listrik yang menggunakan internet. Dalam penerapannya IoT berperan untuk membantu *user* dalam meningkatkan efektivitas kinerja peralatan elektronik dan atau peralatan listrik yang berafiliasi dengan internet.

Kota Cirebon terpilih sebagai satu dari 24 kota dan kabupaten di Indonesia yang mendapatkan bantuan untuk penyusunan *master plan* pengembangan *Smart City*. Dikutip dari website [cirebonkota.go.id](http://cirebonkota.go.id), Kota Cirebon yang terletak di bagian timur Jawa Barat merupakan daerah dataran dengan luas wilayah administrasi hanya 37,35 km persegi atau 3.735,8 hektar. Terdiri dari 5 kecamatan dengan jumlah penduduk Kota Cirebon berdasarkan website [cirebonkota.bps.go.id](http://cirebonkota.bps.go.id) pada mencapai 305.899, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 2,3 persen setiap tahunnya.

Namun implementasi dan pengembangan *Smart City* tidaklah mudah, termasuk di Kota Cirebon. Salah satunya diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika

2014-2019 Rudiantara seperti dikutip dari website kementerian tersebut pada 28 November 2017. Rudiantara menyebutkan jika 80 persen dari total APBD di kota dan kabupaten yang ada di Indonesia selama ini dialokasikan untuk belanja rutin. Ini berarti, hanya tersisa 20 persen anggaran dari total APBD yang bisa digunakan untuk belanja barang termasuk untuk kepentingan *Smart City*. Jika tidak memiliki terobosan baru, minimnya anggaran tersebut tentu bisa menyulitkan pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan *Smart City* di daerah.

Belum lagi struktur organisasi yang kaku, sehingga menyulitkan beberapa orang yang ada di unsur birokrasi untuk bisa melakukan berbagai terobosan. Padahal seperti dikatakan Rudiantara, terobosan dibutuhkan agar pemerintah di daerah bisa mengembangkan dan menerapkan *Smart City*.

Untuk mewujudkan *Smart City* di Kota Cirebon, Pemerintah daerah (Pemda) Kota Cirebon membuat dua tim yaitu tim Dewan Cirebon Kota Cerdas dan tim pelaksana Cirebon Kota Cerdas. Tim Dewan Cirebon Kota Cerdas terdiri dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), akademisi, bisnis, komunitas, pemerintahan serta media. Sedangkan tim pelaksana Cirebon Kota Cerdas merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemda Kota Cirebon.

Sebagai sebuah tim Dewan Cirebon Kota Cerdas dan Pelaksana Cirebon Kota Cerdas senantiasa mengedepankan pola komunikasi organisasi, atau lebih tepatnya kedua tim menggunakan pola komunikasi Adhokrasi. Sementara itu pola komunikasi Adhokrasi sendiri adalah struktur yang memiliki kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi yang rendah. Pola ini merupakan bentuk informal organisasi (Winardi, 2003: 131). Struktur organisasi Adhokrasi memiliki ciri: (1) diferensial horizontal tinggi, (2) Diferensial vertical yang rendah, (3) formalisasi rendah, (4) desentralisasi dan fleksibel yang tinggi, (5) kemampuan bereaksi yang tinggi. Diferensiasi horizontal besar, sebab struktur adhokrasi memiliki banyak profesional dengan tingkat keahlian yang tinggi. Ada pun diferensiasi vertikal rendah dikarenakan pemangkasan tingkat administrasi yang membatasi kemampuan berorganisasi yang bersangkutan dalam beradaptasi.

Kebutuhan terhadap supervisi dalam struktur adhokrasi juga rendah disebabkan cukup banyaknya profesional yang telah mampu menginternalisasi perilaku-perilaku yang diinginkan oleh pihak manajemen. Tidak banyak aturan dalam struktur adhokrasi bahkan aturan yang ada cenderung bersifat lepas dan tidak tertulis. Pengambilan keputusan dalam adhokrasi juga didesentralisasi, sehingga menjadi cepat dan fleksibel. Adhokrasi ini memotong garis birokratik normal untuk mendapatkan kesempatan, menyelesaikan masalah dan mendapatkan hasil tertentu.

Dolan menjelaskan bahwa *adhocracy* merupakan antitesis dari segala sifat birokrasi. Jika birokrasi dipandang terlalu rigid terhadap akselerasi perubahan sosial dan teknologi maka segera dibutuhkan keberadaan *adhocracy* sebagai administratif yang normatif (Dolan, 2010: 33-50).

Dalam praktik struktur tim pelaksana Cirebon Kota Cerdas, Pemda Kota Cirebon menggabungkan unsur kewenangan dan unsur keahlian. Kewenangan jabatan

tetap dibutuhkan untuk mempermudah pengambilan keputusan sedangkan unsur keahlian juga diperlukan untuk menyalasi minimnya anggaran yang tersedia. Keberadaan tim pelaksana Cirebon Kota Cerdas bisa menyalasi kakunya struktur birokrasi dan minimnya anggaran yang ada dalam APBD Kota Cirebon. Keberadaannya diharapkan mampu mewujudkan Kota Cirebon sebagai *Smart City* dengan berbagai keterbatasan yang harus dihadapi.

Menindaklanjuti hal tersebut penulis kemudian membuat penelitian dengan judul Pola Komunikasi Adhokrasi Pada Tim Pelaksana Program Cirebon *Smart City* guna mengetahui bagaimana dan seperti apa pola komunikasi adhokrasi yang ada di Tim Pelaksana Program Cirebon *Smart City*.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu dengan cara mencari informasi tentang gejala yang ada, didefinisikan dengan jelas tujuan yang akan dicapai, merencanakan cara pendekatannya, mengumpulkan data sebagai bahan untuk membuat laporan. Moleong dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif mengungkapkan jika penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara intensif dan terperinci terhadap suatu organisme, lembaga atau gejala tertentu melalui suatu pengamatan atau analisis untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang, gejala atau perilaku yang diamati (Moleong, 2005:3).

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-stratgi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Tujuannya untuk memahami secara luas dan mendalam terhadap suatu permasalahan yang sedang dikaji atau akan dikaji dan data yang dikumpulkan lebih banyak huruf, kata ataupun gambar daripada angka.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini observasi dan wawancara. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pola Komunikasi Adhokrasi dan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Tim Pelaksanaan Cirebon *Smart City*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Struktur Tim untuk Mewujudkan *Smart City* di Kota Cirebon

Sejak ditetapkan sebagai salah satu kota dari 24 kota di Indonesia untuk mengimplementasikan *Smart City*, Pemda Kota Cirebon membentuk dua tim. Masing-masing Dewan Cirebon Kota Cerdas serta tim pelaksana Cirebon Kota Cerdas. Tim Dewan Cirebon Kota Cerdas dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Cirebon Nomor 555.05/Kep.262-DKIS/2017. Menurut Kepala DKIS Kota Cirebon, Ma'ruf Nuryasa, Dewan Cirebon Kota Cerdas terdiri dari unsur ada unsur pendidikan, ABCGM. Yaitu akademisi, bisnis, community, goverment dan media. Dirangkulnya unsur stakeholder terkait dikarenakan *Smart City* ini merupakan program bersama dan berkelanjutan. Sehingga semuanya dirangkul dan diminta terlibat dalam pelaksanaan *Smart City*.

Selain itu, melalui SK Walikota Cirebon No 555.05/Kep.263-DKIS/2017 dibentuk juga tim pelaksana Cirebon Kota Cerdas. Tim ini merupakan tim kecil yang berisi orang-orang dari jajaran aparatur sipil negara (ASN) yang ada di Kota Cirebon. Tim ini terdiri dari 6 pokja yang merupakan elemen dari *Smart City*, masing-masing pokja smart governance, pokja smart branding, pokja smart economy, pokja smart living, pokja smart society, dan pokja smart environment. Masing-masing pokja memiliki koordinator dan anggota yang ditunjuk berdasarkan jabatan yang dimiliki di sejumlah dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Kota Cirebon.

Sebagai contoh untuk pokja smart environment yang menjadi koordinator yaitu kepala bagian administrasi pembangunan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon. Sedangkan yang menjadi anggotanya sejumlah kepala bidang maupun kepala seksi dan kepala sub bagian yang ada di dinas maupun di lingkungan setda Kota Cirebon.

Menurut Kepala DKIS, Ma'ruf Nuryasa, dibentuknya tim pelaksana yang merangkul seluruh orang yang ada di satuan kerja perangkat daerah dikarenakan mereka tidak ingin jika program *Smart City* hanya merupakan tugas dari DKIS saja.

*“Kita ingin bahwa berbicara tentang Cirebon Smart City kota cerdas ini program milik bersama. Ini kan inisiasinya dari kominfo, kita khawatir pemikiran orang karena ini inisiasinya dari kominfo, nantinya merupakan programnya dinas yang menangani kominfo saja, padahal bukan. Karena ini sebenarnya merupakan kerja bersama. Jadi kita mengambil orang-orang dari dinas lain selain karena jabatan juga melihat potensi yang dimiliki”*.

Selain pokja 6 elemen *Smart City*, dalam tim pelaksana juga mencantumkan unsur penunjang. Yang terdiri dari :

- a. Tim Tata Kelola *Smart City*
- b. Tim Infrastruktur dan Teknologi Informasi *Smart City*
- c. Tim Pengelola Layanan *Smart City*
- d. Tim Pengembang Aplikasi *Smart City*

Tim penunjang ini juga memiliki koordinator dan anggota. Uniknya, koordinator ditunjuk dengan melihat jabatan sedangkan anggota penunjukkannya selain berdasarkan jabatan juga berdasarkan kemampuan. Karena itu, seorang pelaksana yang tidak memiliki jabatan tertentu di satuan kerja perangkat daerah dimasukkan ke dalam tim ini. Menurut Ma'ruf Nuryasa:

*Jadi kita mengambil orang-orang dari dinas lain selain karena jabatan juga melihat potensi yang dimiliki. Kita butuh orang-orang yang potensial, memiliki wawasan luas dan tidak selalu senang berada di zona nyaman. Karena itu, struktur tim pelaksana didasarkan pada dua, yaitu jabatan dan kemampuan.*

Sebagai contoh pada tim tata kelola *Smart City*, memiliki seorang koordinator yang ditunjuk karena jabatan, yaitu kepala seksi tata kelola e-government bidang layanan E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota

Cirebon. Tim ini memiliki 11 anggota. Dari 11 anggota tersebut 7 anggota ditunjuk berdasarkan jabatan, sedangkan 5 anggota lainnya dimasukkan ke dalam tim berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak memiliki jabatan apa-apa, hanya sebagai pelaksana di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Kota Cirebon.

Sedangkan dari tim infrastruktur dan teknologi informasi *Smart City*, komposisi orang yang ditunjuk masuk dalam struktur justru lebih banyak dari pelaksana. Tim ini memiliki seorang koordinator yaitu kepala seksi infrastruktur dan teknologi bidang teknologi informasi dan komunikasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon dan memiliki 10 anggota. Sebanyak 6 anggota merupakan pelaksana dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah yang ada di Kota Cirebon dan mereka tidak memiliki jabatan apa pun.

Struktur pada tim pelaksana *Smart City* Kota Cirebon merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemda Kota Cirebon. Penempatan orang-orang yang ada pada tim pelaksana teknis mengambil dua pendekatan, yaitu pendekatan karena jabatan serta pendekatan karena kemampuan atau potensi yang dimiliki seorang ASN. Seperti diungkapkan oleh Kepala DKIS Kota Cirebon, Ma'ruf Nuryasa:

*“Tim pelaksana Smart City adalah anggotanya lebih sedikit. Itu adalah orang-orang yang kita anggap memiliki kompetensi untuk menjadi teknis di pelaksanaan Smart City. Makanya strategi kita beda, kalau di dewan Smart City pendekatannya kan ke struktural jabatan tapi kalau di tim pelaksana itu bisa ke jabatan bisa juga ke kompetensi. Jadi misalnya gini, ke kompetensi biarpun staf kalau memiliki kompetensi kita masukkan ke tim pelaksana Smart City”.*

Alasan memilih dua pendekatan, jabatan dan kompetensi dalam tim pelaksana *Smart City* dikarenakan kebutuhan. Pendekatan jabatan masih dibutuhkan karena memang seorang pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau kebijakan. Namun terkadang pejabat yang ditempatkan di suatu posisi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Ada seorang ASN yang memiliki jabatan berlatar belakang kesehatan, namun ia menduduki jabatan di bidang keuangan. Karena kewajiban seorang ASN yang memang harus siap ditempatkan di bidang mana pun.

## **2. Pola Komunikasi Tim Pelaksana *Smart City***

Tim pelaksana *Smart City* Kota Cirebon bertugas untuk menyusun masterplan *Smart City*. Dalam penyusunan masterplan ini, tim pelaksana *Smart City* Kota Cirebon tetap memperhatikan kearifan lokal dengan menggunakan istilah dan bahasa Cirebon dalam nomenklatur program-program *Smart City*. Karenanya kemudian muncul nama yang cukup unik, seperti Cirebon Lengko yang merupakan singkatan dari Layanan Elektronik Kesehatan Online, Cirebon Brojol Aja Klalen yang merupakan singkatan dari Akte Langsung Jadi Kalau Laporan Lewat Online yang merupakan konsep one day service. Ada pula Cirebon Sedulur atau Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan,

Cirebon Segi Jamblang atau sistem elektronik kepegawaian dan evaluasi kinerja secara gamblang. Ada juga Portal Satin Cirebon Pasti Weru, yaitu penyajian informasi Kota Cirebon dalam satu portal, juga Wadul Bae atau warga peduli bocah lan emboke.

Tim pelaksana *Smart City* bekerja lebih dinamis dibandingkan dengan struktur birokrasi lainnya. Berbagai usulan diakomodir selanjutnya didiskusikan dalam suatu Focuss Group Discussion (FGD) yang digelar setiap tahun. FGD ini sebenarnya pertemuan antara dewan *Smart City* dan tim pelaksana *Smart City*. Setiap orang, bisa memberikan usulannya. Seperti diungkapkan Ma'ruf:

*Bisa, kan ada FGD nya nanti. Nah tahun ini strategi kita ada di evaluasi.*

FGD digelar untuk membangun komitmen bersama termasuk membangun apa yang akan dilakukan di tahun yang akan berjalan melalui program *quick win*, atau program jangka pendek maupun menengah yang harus dilakukan tahun tersebut. Salah satu *quick win* yang berhasil dicapai pada 2017 seperti gambar di bawah:



Sumber: Laporan Kota Cirebon Menuju *Smart City* dari Ma'ruf Nuryasa

Dari laporan di atas, ada 4 program yang berhasil diterapkan yaitu Wadul Bae (Warga Peduli Bocah lan emboke), Cirebon Melet (Cirebon Melek Internet), Cirebon Brojol Aja Klalen (Akte Langsung Jadi Kalau Lapor Lewat Online) serta Cirebon Lengko (Layanan Elektronik Kesehatan Online).

Untuk Cirebon Melet atau melek internet berupa pemasangan wifi gratis di sejumlah titik di Kota Cirebon. Menyiasati minimnya anggaran, Kota Cirebon menggandeng sejumlah provider untuk memasang wifi gratis di beberapa sudut di Kota Cirebon. Sinergi dilakukan untuk menyiasati minimnya anggaran. Bandingkan dengan Kabupaten Badung, Bali, seperti ditulis Nusabali.com tertanggal 14 Januari 2018 dengan judul Badung Pasang Wifi Gratis di 982 Titik. Pemasangan wifi gratis tersebut dianggarkan dalam APBD Kabupaten Badung dengan anggaran sebesar Rp 30 miliar.

Sedangkan pada 2018, yang berhasil dicapai yaitu Cirebon Satu Data, Cirebon Lunga, Wistakon (Wisata Kota Cirebon), Cirebon Segi Jamblang, Icirebon, Cirebon 112. Untuk Cirebon 112 merupakan nomor tunggal kedaruratan yang menggabungkan semua unsur nomor kedaruratan di Kota Cirebon. Sejumlah nomor yang disatukan

dalam layanan kedaruratan 112 diantaranya layanan darurat 123 PLN, layanan darurat 115 BNPD, layanan darurat 119 public safety center, layanan darurat 110 contact center kepolisian, layanan darurat 113 pemadam kebakaran dan layanan darurat 118 ambulans gawat darurat.

Pada 2019, program *Smart City* yang sudah berjalan di Kota Cirebon yaitu Kudu Eling (Kolaborasi Penduduk dalam Pengelolaan Lingkungan) serta Cirebon Matahatiku (Memantau Kota Penuh Bahagia dengan CCTV ku).

Sekalipun tidak menyebutkan secara real struktur tim sebagai adhokrasi, Pemda Kota Cirebon dapat dikatakan telah berupaya untuk menerapkan struktur adhokrasi untuk mewujudkan *Smart City*. Dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, baik dari segi jabatan maupun wawasan yang luas, implementasi *Smart City* dari masterplan yang dibuat pada 2017 hingga 2019 telah mencapai 70,49 persen.

## PROGRAM IMPLEMENTASI SMART CITY

Master Plan Smart City Kota Cirebon 2017 - 2028

No	Dimensi	Target (2017-2019)	Realisasi Kumulatif Hingga 2019		
			Terealisasi	Belum Terealisasi	Persentase Realisasi
1	Smart Governance	14	14	0	100,00%
2	Smart Economy	4	4	0	100,00%
3	Smart Branding	9	5	4	55,56%
4	Smart Society	11	8	3	72,73%
5	Smart Living	10	4	6	40,00%
6	Smart Environment	13	8	5	61,54%
<b>TOTAL</b>		<b>61</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>70,49%</b>



Sumber: Laporan Kota Cirebon Menuju *Smart City* dari Ma'ruf Nuryasa

Masterplan *Smart City* Kota Cirebon yang dibuat 2017, berlaku selama 10 tahun, yaitu hingga 2028. Saat ini, Kota Cirebon akan melakukan evaluasi terkait implementasi program-program *Smart City* yang telah dilakukan. Seperti diungkapkan Ma'ruf Nuryasa:

*Secara umum yang tertuang di master plan sudah tertuang semua. Tahun ini kita evaluasi Smart City bekerja sama dengan kominfo, kota Cirebon dijadikan locus penelitian. Tapi sebelum mereka dengan tim peneliti melakukan evaluasi, kita sudah melakukan evaluasi internal. Kekurangan kita adalah sosialisasi. Karena banyak program yang di masyarakat itu belum tahu. Makanya kita sambil jalan evaluasi, sosialisasi kita tingkatkan. Makanya ada baru dari kita yaitu kudu pintar.*



Capaian 70 persen implementasi tidak menjamin program-program *Smart City* yang dilakukan Pemda Kota Cirebon tersosialisasi dengan baik. Karena itu, sembari melakukan evaluasi mereka juga menggenjot sosialisasi. Program yang digelontorkan yaitu melalui Kudu Pinter atau Kuis daring Untuk Pengetahuan Individu Terbaik. Polanya dengan tim dari DKIS mendatangi kerumunan tanpa menjauhkan mereka dari gadget. Dari kuis daring tersebut masyarakat 'dites' pengetahuan mengenai *Smart City* sekaligus memperkenalkan program-program *Smart City* di Kota Cirebon.

### 3. Perbandingan Pola Birokrasi dan Adhokrasi

Birokrasi menekankan pada struktur. Akhirnya berbagai kendala muncul. Seperti berita yang dikutip dari pikiran-rakyat.com tanggal 21 Agustus 2019 dengan judul Gelar Juara 1 Dicoret karena Tidak Memiliki Dana. Berita itu menyebutkan jika perwakilan tim penggerak PKK Kota Cirebon gagal menjadi juara satu lomba cipta menu atau Festival Pangan Lokal B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) tahun 2019 di Gedung Sate pada Selasa, 13 Agustus 2019 lalu.

Sebenarnya TP PKK keluar sebagai juara 1 dalam lomba kategori umum dan berhak mewakili Jabar dalam Festival Pangan Lokal B2SA tingkat Nasional tahun 2019 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun saat ditanyakan kesanggupan untuk membiayai keberangkatan tim ke Kendari, perwakilan Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Kota Cirebon yang mendampingi TP PKK menyatakan Kota Cirebon tidak memiliki alokasi dana untuk keberangkatan tersebut.

Kakunya sistem birokrasi membuat pencarian dana juga menjadi terbatas. Setiap program harus sudah terencana satu tahun sebelumnya. Sehingga program dadakan di tahun berjalan, tidak bisa terealisasi karena ketiadaan anggaran. Inovasi juga sulit dilakukan karena masing-masing orang sudah terpaku dengan tugas yang telah diprogram sebelumnya.

Ada pula berita yang dikutip dari Republika.co.id tertanggal 18 Februari 2020 dengan judul Kemenlu Dorong Produk UMKM Kota Cirebon Go International. Kemenlu RI menawarkan pameran produk-produk UMKM di Kota Cirebon untuk melakukan pameran di Johor, Malaysia. Mereka bahkan sudah menyediakan *booth* untuk digunakan. Syaratnya mudah, yaitu UMKM yang mengikuti pameran yang memang sudah siap melakukan ekspor produk mereka, produk yang dihasilkan kontinyu, memiliki labelling dan packaging serta memiliki lisensi ekspor.

Walikota Cirebon akhirnya langsung menekankan kepada stafnya untuk segera menangkap peluang ini. Disperindag Kota Cirebon diminta untuk bergerak dan melakukan terobosan sekalipun tahun ini tidak dianggarkan dana untuk kegiatan tersebut.

Jika dibandingkan dengan struktur pada pelaksanaan *Smart City*, yang memadukan antara jabatan dan kompetensi, serta komunikasi melalui FGD, maka kendala bisa diatasi. Termasuk kendala minimnya dana. Seperti diungkapkan Ma'ruf

Nuryasa terkait kombinasi yang ada pada struktur tim pelaksana *Smart City* Kota Cirebon:

*Weh, berhasil. Karena ini akhirnya saling menutup, saling melengkapi. Kalau pejabat struktural kan kita kita butuhkan kewenangannya, tapi kalau yang pelaksana, yang kita perlukan itu kemampuan dan kapabilitas personal. Jadi kita tidak mematikan mutiara-mutiara. Meskipun masih staf, kita tarik jadi tim yang kreatif. Karena gini lho, Smart City perlu orang-orang yang berdedikasi dan kreativitas tinggi dan itu biasanya ada di anak-anak muda*

## KESIMPULAN

Ditunjuk sebagai salah satu kota untuk mengimplementasikan *Smart City*, Kota Cirebon berupaya sekreatif mungkin untuk menyiasati berbagai kendala. Khususnya kendala struktural. Struktur dibuat sedinamis mungkin dengan memadukan kombinasi unsur pejabat struktural dan unsur pelaksana yang memiliki semangat dan kompetensi yang sangat baik.

Tidak hanya itu, Kota Cirebon juga merangkul semua elemen yang ada untuk bisa menyelesaikan implementasi *Smart City* tersebut. Mulai dari akademisi, bisnis, government, media dan lainnya. Dikarenakan program *Smart City* sebenarnya merupakan program bersama dan berkelanjutan. Selain itu, *Smart City* juga berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat yang aman, nyaman, sejahtera dan bahagia secara berkelanjutan, baik itu menggunakan teknologi informasi maupun tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. 2008. *Jurnal Administrasi Publik. Kondisi Birokrasi Di Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Pelayanan Publik.*
- Andhika, L. R. 2018. *Dari Struktur Birokrasi Tradisional ke Model Adhocracy (Struktur Organisasi Inovatif).* Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.1809>
- Dolan, E. Timothy. 2010. *Journal of Future Studies. Revisiting Adhocracy: From Rhetorical Revisionism to Smart Mobs.*
- Hidayat, Dedy N. 2003. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik.* Jakarta: Departemen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia
- Junaedi, Apri. 2015. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan. Internet of Things, Sejarah, Teknologi dan Penerapan Review.*
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung.* Penerbit: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 131.

[https://kominfo.go.id/content/detail/11656/langkah-menuju-100-smart-city/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/11656/langkah-menuju-100-smart-city/0/sorotan_media)